

Analisis implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara (Tinjauan pasca penerapan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara) = Implementation analysis of corporate income tax policy on mining industries (In accordance with the application of mining law No. 4 Year 2009 )

Azalia Fajri Septihani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20386116&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

UU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

**ABSTRACT**

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia's current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a positive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved.